

# NEWSLETTER

Dapatkan newsletter ini di: [www.idscore.id](http://www.idscore.id)



Pembaca yang kami hormati,

**K**ini kita sudah berada pada paruh kedua tahun 2021. Tahun yang masih penuh tantangan akibat belum meredanya pandemi Covid 19. Sebagian target dan prediksi sampai tengah tahun telah bisa kita perkirakan hasilnya. Diparuh kedua perjalanan kita tahun ini, dipastikan masih akan diwarnai oleh dampak pandemi terhadap ekonomi, sosial dan kegiatan usaha yang membutuhkan fokus yang tajam, kerja keras dan pengelolaan risiko secara cermat.

Bank Indonesia pada 16-17 Juni 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga, serta upaya untuk memperkuat pemulihan ekonomi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan profil risiko lembaga jasa keuangan pada Mei 2021 masih relatif terjaga dengan rasio NPL gross perbankan tercatat sebesar 3,35% (NPL net: 1,09%) dan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan Mei 2021 meningkat menjadi 4,0% (April 2021: 3,9%). Fintech P2P lending pada periode yang sama mencatatkan pertumbuhan baki debit pembiayaan cukup signifikan sebesar 69,1% yoy menjadi Rp 21,75 triliun. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan masih berada di zona kontraksi dan

## BERBAGI PERAN OPTIMALKAN PEMULIHAN

mencatatkan pertumbuhan negatif 13,7% yoy di Mei 2021.

Likuiditas industri perbankan sampai saat ini masih berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK per Mei 2021 terpantau masing-masing pada level 150,96% dan 32,71%, di atas *threshold* masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Permodalan lembaga jasa keuangan juga masih pada level yang memadai. *Capital Adequacy Ratio* industri perbankan tercatat sebesar 24,38%, jauh di atas *threshold*. Begitupun *gearing ratio* perusahaan pembiayaan yang tercatat sebesar 2,01x, jauh di bawah batas maksimum 10x.

Perbaikan ekonomi juga tercermin pada kinerja beberapa sektor utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi yang terus membaik. Ke depan, pemulihan ekonomi domestik didorong oleh akselerasi perekonomian global, kecepatan vaksinasi, dan penguatan sinergi kebijakan, meskipun dibayangi oleh peningkatan kembali kasus Covid-19 yang muncul pada akhir triwulan II. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 tetap sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia pada April 2021, yakni pada kisaran 4,1%-5,1%.

Optimisme tercapainya target ketebalan komunal (*herd immunity*) bagi pelaku jasa keuangan di Agustus 2021 seperti yang dikatakan Presiden Republik Indonesia,



Joko Widodo semakin menimbulkan harapan dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah itu didukung juga oleh peningkatan target vaksinasi dari sebelumnya 500 ribu dosis menjadi 1 juta dosis per hari mulai Juli 2021. Upaya ini dilakukan demi mendorong terpenuhinya target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 dikisaran 4,5% - 5,5%.

Program penjaminan kredit yang disalurkan pemerintah diharapkan dapat membantu kegiatan usaha, menghidupkan roda perekonomian sehingga dapat memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha. Program ini diharapkan dapat membuat sektor perbankan menjadi lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko serta lebih leluasa menyalurkan kredit modal kerja kepada pelaku usaha di sektor padat karya.

Kementerian Keuangan mengalokasikan dana PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Jumlah ini meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp 695,2 triliun atau mengalami kenaikan 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020. Kenaikan anggaran ini diharapkan bisa menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

Anggaran PEN 2021 berfokus pada lima bidang yakni, kesehatan sebesar Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp 186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp 53,9 triliun, serta program prioritas Rp 125,1 triliun. Dengan kebijakan tersebut tren pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan meningkat di kuartal I 2021. Oleh karena itu APBN tetap jadi *countercyclical* dan program vaksinasi diharapkan efektif sehingga pemulihan ekonomi bisa diperkuat.

Pada edisi kali ini kita akan mengulas tentang penjaminan kredit, optimalisasi potensi penyaluran kredit melalui skema penjaminan dan gambaran sejauh mana program penjaminan kredit yang sudah berjalan. Selain itu, kami juga menyajikan beberapa informasi kilas kegiatan kami beberapa waktu lalu.

Salam kami,

Yohanes Arts Abimanyu  
 Direktur Utama

# ” PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA KORPORASI SEMAKIN DIPERMUDAH

Pemanfaatan fasilitas penjaminan kredit modal kerja kini semakin dipermudah. Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan telah melakukan perubahan berupa pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi yang lebih bersifat akomodatif dan fleksibel.

Pelonggaran tersebut dimaksudkan untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha korporasi yang menerima fasilitas pembiayaan. Tidak hanya itu, beberapa perubahan juga dilakukan agar kriteria penjaminan pemerintah lebih menyesuaikan dengan risiko yang dihadapi oleh penjamin, perbankan, dan pelaku usaha korporasi antara lain berupa penurunan volume penjualan atau laba, terganggunya perputaran usaha di sektor terdampak, dan lokasi usaha berada dalam wilayah yang berisiko. Hambatan yang dihadapi pelaku usaha korporasi untuk kembali melakukan aktivitas normal, salah satunya disebabkan

kesulitan untuk mendapatkan kredit modal kerja.

Sebelumnya, Pemerintah telah meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2020 (PMK 98/2020). Selanjutnya, pelonggaran atas ketentuan tata kelola penjaminan pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.08/2021. Rincian perubahan ketentuan diantaranya:

1. Merubah kriteria Pelaku Usaha Korporasi;
2. Menambah tenor pinjaman yang dijamin;
3. Mengurangi batas minimal pinjaman modal kerja;
4. Menambah pengaturan terkait pinjaman sindikasi dan restrukturisasi pinjaman;
5. Mengubah porsi subsidi IJP yang ditanggung Pemerintah;
6. Merubah formula penghitungan IJP, serta

7. Memperpanjang batas akhir fasilitas penjaminan.

Berdasarkan penyempurnaan ketentuan tersebut, maka kriteria untuk pelaku usaha korporasi selaku terjamin, meliputi:

- 1.) Mempekerjakan tenaga kerja minimal 100 (seratus) orang. Namun demikian, Menteri dapat memberikan pengecualian jumlah tenaga kerja minimal menjadi 50 orang kepada sektor tertentu yang ditetapkan dalam surat Menteri;
- 2.) Terdampak Covid-19, diantaranya:
  - a. Volume penjualan maupun laba pelaku usaha mengalami penurunan;
  - b. Sektor industri pelaku usaha terdampak;
  - c. Lokasi usaha pelaku usaha termasuk wilayah yang berisiko;
  - d. Perputaran usaha pelaku usaha terganggu; dan/atau

- e. Kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha;
- 3.) Berbentuk badan usaha;
  - 4.) Merupakan debitur existing dan/atau debitur baru dari penerima jaminan;
  - 5.) Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional; dan
  - 6.) Memiliki performing loan lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) posisi per tanggal 29 Februari 2020.

Pelonggaran ketentuan pada skema penjaminan pemerintah ini diharapkan dapat membantu menjaga kondisi keuangan korporasi sekaligus turut membangkitkan sektor riil dan memberikan dampak ke aspek lainnya, seperti minimalisasi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Hal ini sejalan dengan tujuan program PEN yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020, yaitu untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

## EKSPANSI KREDIT LEBIH LELUASA DENGAN PENJAMINAN KREDIT

Peningkatan penyaluran kredit oleh lembaga keuangan merupakan strategi untuk mewujudkan target bisnis melalui peningkatan pendapatan usaha dan laba sepanjang risiko dikelola dengan cermat guna menghindari kemungkinan gagal bayar, kenaikan NPL dan penurunan kualitas portfolio kredit. Mitigasi risiko kredit dimungkinkan dengan program penjaminan kredit melalui lembaga penjamin kredit yang akan menyerap risiko gagal bayar oleh debitur.

Penjaminan kredit dapat menjadi solusi bagi kreditur seperti perbankan agar dapat lebih leluasa dan ekspansif dalam menyalurkan kredit. Kehadiran lembaga penjaminan bertujuan untuk memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank.

Lembaga penjaminan kredit juga merupakan solusi yang menolong debitur dalam mendapatkan akses fasilitas kredit dari perbankan yang selama ini masih terbatas dan memerlukan jaminan yang memadai. Untuk itu, pendalaman karakter dan profil debitur secara spesifik menjadi syarat agar penjaminan kredit dilakukan secara tepat sasaran, efektif dan menguntungkan semua pihak.

Salah satu jenis kredit yang bisa digarap potensi secara optimal adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja berperan dalam menggerakkan roda perekonomian melalui suntikan modal kepada pelaku usaha dalam rangka memulai atau mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini dapat membantu sektor usaha bisnis berskala besar,

menengah maupun kecil dalam menghadapi situasi sulit seperti saat ini.

Dalam melakukan asesmen atas penjaminan yang diajukan, lembaga penjamin membutuhkan informasi komprehensif berbasis kajian riset profil debitur melalui penilaian risiko dari berbagai aspek seperti risiko industri, risiko bisnis, risiko keuangan, dan profil perkreditan. Untuk itu, kerja sama antara biro kredit dan lembaga penjamin kredit menjadi sangat penting. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, IdScore berperan dalam mendukung program penjaminan kredit yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui penyediaan informasi kajian riset bisnis calon debitur korporasi yang dikombinasikan dengan laporan kredit historis beserta penyajian informasi *credit score* guna memahami karakter debitur. Kesemua informasi tersebut dapat memberikan gambaran utuh profil calon debitur pelaku usaha secara lengkap melalui pendalaman profil dan kemampuan membayar kewajiban untuk mendukung proses pengambilan keputusan kredit dan penjaminannya secara cermat dan efisien.

Melalui program penjaminan ini, pendalaman profil dan risiko kredit calon debitur secara komprehensif dapat mengoptimalkan peluang penyaluran kredit sekaligus mendorong kembali perekonomian dengan jalan perbaikan kualitas kredit. Di sisi lain, pelaku usaha yang sudah mandiri dan layak kredit namun belum dapat memenuhi persyaratan jaminan kepada bank dimungkinkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank melalui program penjaminan. Lebih lanjut, program penjaminan kredit yang tengah digenjut pemerintah tidak bisa terlepas dari peningkatan inklusi keuangan dengan didukung komitmen manajemen risiko kredit yang berkualitas dari lembaga jasa keuangan.

Sinergi antara IdScore dan LPEI berperan dalam memacu peningkatan volume penyaluran kredit dengan risiko terukur, mencegah kredit macet dan terjadinya *fraud*, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan portfolio kredit yang berkualitas, bertumbuh dan bahkan meningkatkan potensi penyerapan kredit oleh segmen *underbanked* dan *unbanked*.

# SEKTOR RITEL DOMINASI PROGRAM PENJAMINAN KREDIT MODAL KERJA

Sektor ritel mengambil porsi terbesar dalam program penjaminan kredit modal kerja. Sebesar 19,5% dari total nilai penjaminan sebesar Rp1,53 triliun hingga akhir Mei 2021 dialokasikan untuk sektor ritel. Berikutnya adalah batu bara (19,5 persen), kertas (13 persen), pakan ternak (10 persen), tekstil (19,2 persen), perkebunan (8,4 persen), otomotif (3 persen), konstruksi (2 persen), kulit dan alas kaki (1,3 persen), perikanan (1,2 persen), jasa *outsourcing* (1,1 persen), jamu dan kosmetik (1,8 persen).

Realisasi penjaminan tersebut berasal dari beberapa bank yang berpartisipasi dalam program penjaminan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Resona Perdania, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, dan Standard Chartered Bank.

Penjaminan kredit modal kerja memungkinkan sekitar 30.612 tenaga kerja dapat tetap bekerja pada pelaku usaha yang memperoleh kredit modal kerja. Sebagian besar tenaga tersebut tersebar pada sektor tekstil sebanyak 26% diikuti oleh sektor ritel 25% dan sektor jasa 10%.

Aturan penjaminan kredit modal kerja saat ini memungkinkan pelaku usaha yang mempekerjakan minimal 50 orang untuk mendapatkan jaminan

kredit dari pemerintah. Penjaminan ini berlaku bagi pelaku usaha korporasi yang terdampak pandemi Covid-19 seperti volume penjualan maupun laba mengalami penurunan, lokasi usaha termasuk wilayah yang berisiko, perputaran usaha bisnisnya terganggu dan atau kredit modal kerja sulit diakses oleh pelaku usaha. Kriteria lainnya yang juga bisa dijamin pemerintah harus berbentuk badan usaha, merupakan debitur *existing* dan/atau debitur baru dari penerima jaminan, tidak termasuk dalam daftar hitam nasional. Disamping itu pelaku usaha yang ingin terjamin kredatnya harus memiliki *performing loan* lancar (kolektibilitas 1 atau kolektibilitas 2) posisi per tanggal 29 Februari 2020.

Di sisi lain, pihak yang bertindak sebagai penjamin kredit akan menerima Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang dibayarkan oleh pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pelaku usaha dengan nilai penjaminan Rp 5 miliar - Rp 50 miliar, menerima IJP 100%.
- Pelaku usaha dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar - Rp 300 miliar, menerima IJP 100%.
- Pelaku usaha dengan nilai penjaminan lebih dari Rp 300 miliar - Rp 1 triliun, menerima IJP berdasarkan dua ketentuan yaitu.

1. 80% dan 20% dibayarkan oleh pelaku usaha untuk penjaminan yang diterbitkan pada periode 1 April 2021 - 31 Juli 2021
2. 70% dan 30% dibayarkan oleh pelaku usaha untuk penjaminan yang diterbitkan periode 1 Agustus 2021 - 17 Desember 2021.

Adapun IJP dihitung dengan formula = tarif IJP x Nilai Penjaminan.

Penjaminan ini diharapkan dapat membantu menjaga kondisi keuangan korporasi sekaligus turut membangkitkan sektor riil dan memberikan dampak ke aspek lainnya, seperti minimalisasi pemutusan hubungan kerja akibat pandemi.

Hingga akhir Mei 2021, sudah ada sekitar 22 bank yang resmi bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam rangka penjaminan kredit yang diperkirakan jumlahnya akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan kredit korporasi.

Insentif dalam bentuk proram penjaminan ini diberikan agar perbankan dapat menyalurkan kredit kepada pelaku usaha korporasi yang membutuhkan, karena tingkat risiko kredit telah dijamin oleh skema penjaminan. (dari berbagai sumber)



### Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020 – 2021 Ke Provinsi Bali

PEFINDO Biro Kredit IdScore berpartisipasi dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI guna membahas program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Stimulus Sektor Pariwisata (Bali, 27 Mei 2021). Acara juga dihadiri oleh unsur pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Himpunan Bank Negara (HIMBARA), Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Kamar Dagang Dan Industri Bali dan Pemerintah Provinsi Bali.

### Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2021

PEFINDO Biro Kredit IdScore mengadakan RUPS Tahunan 2021 di Jakarta (Jumat, 21 Mei 2021) secara *online* dan *offline*. Rapat ini dihadiri oleh seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.



### Marcomm Dream Team 2021

PEFINDO Biro Kredit IdScore kembali meraih penghargaan sebagai "Most Effective Marcomm Team" pada ajang *Marcomm & Corcomm Dream Team 2021* yang merupakan kolaborasi antara majalah *MIX Marketing & Communications* dan majalah *SWA*. Penganugerahan penghargaan dilakukan Kamis 29 April 2021 pada acara *Sweet Seventeenth Majalah Mix Marketing & Communications*.



### Indonesian Human Resources Award 2021

PEFINDO Biro Kredit IdScore berhasil meraih penghargaan sebagai "The Best HR Management for The Outstanding Working Culture and Comprehensive HR Systems" pada ajang *Human Resources Awards 2021: Empowering Human Resources as The Core of Economic Recovery* yang digelar media *Warta Ekonomi*.



### Seminar Online Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

PEFINDO Biro Kredit IdScore mendukung kegiatan seminar online yang diselenggarakan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan tema *Peluang dan Tantangan Kebijakan Restrukturisasi Tahap 2* (27 April 2021). Acara diikuti oleh sekitar 260 peserta yang terdiri dari Direktur dan Komisaris pelaku industri perusahaan pembiayaan. PEFINDO Biro Kredit IdScore yang diwakili Direktur Utama Yohanes Arts Abimanyu menyampaikan materi "Optimalisasi Data Melalui Otomatisasi Dalam Mendukung Penyaluran Pembiayaan".

### Townhall Meeting Q1 2021

Kegiatan *Townhall Meeting Q1 2021* PEFINDO Biro Kredit IdScore diselenggarakan pada tanggal 23 April 2021. Acara diisi dengan pemaparan *update* kinerja dan pencapaian perusahaan selama Q1 - 2021, *update* kondisi ekonomi, peta persaingan, target serta rencana kegiatan untuk Q2 - 2021. Kegiatan ini diikuti Direksi dan seluruh karyawan untuk lebih menyegarkan ide, motivasi dan menyamakan langkah dalam melanjutkan perjalanan di tahun 2021.



PT PEFINDO Biro Kredit

Gedung Bursa Efek Indonesia  
Tower 1 Lantai 1  
Jalan Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia  
Telp: +62 21 515 4501 Fax: +62 21 515 4503  
www.idscore.co.id  
info@pefindobirokredit.co.id

@IdScore\_Ind

idscore.id

IdScore

IdScore

IdScore Indonesia